

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Semakin Tingginya Jumlah Angka  
Golput Di Kecamatan Semarang Barat Pada Pemilihan Walikota Semarang  
26 Juni 2005**

Oleh : D2B001078\_SUWEDOTOMO

***Abstrac***

*One characteristic of democracy is the existence of free general election. The general election in the local government context also includes free direct election of Head Local Government, such as Governors, Mayors or Head of regency. This direct election will also provide more political benefits, such as consistent mechanism of Government leadership selection both in national & local politics life of democratic politics and accountability people's political education, maturity of political parties, development of check and balances mechanism and the increase of awareness of people sovereignty.*

*The implementation of decentralization (otonomi daerah) is clearly an effort to encourage Indonesian political emancipation. The Government throught UU No. 32 Tahun 2004 (Act No. 32 of 2004), guarantee and support the democratis process. It manifested by head local government direct election or called with Pilkada, however the passing of act that guarantee and support the democratic process of local election does not automaticlly support the implementation democraton process.*

*The fall of Soeharto's authoritarianism regime results is the rise of local decentralization. Local decentralizations requires public participation in every decisions process including direct local government head election. This direct election can beused to rise political education and increase political maturation. By doing so, it will get capable, acceptable, and accountable leaders of local government.*

*This entry is portraying the shift of local governance's paradigm under of uprising of good governance spirit. After the fall of Soeharto's New Order regime, the government officials could not deny the important of shifting their elitist paradigm into a more appropriate one, that can protect and preserve their interests.*

*Local direct election will give wider space and more opportunities for people's direct political participation in fact, unfortunately, mainstream political parties have better preparation to make the use the space than democratic movements have. This thesis note that current local election have led to preservation of power oligarchy and big parties domination.*

*Keywords : Vote behaviour, political parties, election system.*

## A. Pendahuluan

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal diselenggarakannya pemilihan umum secara periodik dan berkala yang ditujukan untuk memilih seorang pejabat publik baik pada tingkat lokal maupun nasional. Pasal 18 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa “ *Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang* ”. Namun di dalam Undang-Undang Dasar tidak menjelaskan bagaimana cara mengangkat Gubernur, Bupati dan Walikota yang bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sedangkan apabila kita lihat mekanisme pemilihan Presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi di negara ini beserta Wakilnya sudah dipilih secara langsung dalam satu paket pencalonan, seharusnya pemilihan para pejabat Eksekutif dibawahnya seperti Gubernur serta Bupati maupun Walikota harus dipilih secara langsung pula oleh rakyat di daerah sesuai dengan tingkatan pemerintah daerah. Berbekal melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang juga mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Maka melalui produk hukum paling mutakhir ini tiap-tiap daerah di Indonesia dipersilahkan untuk memilih Kepala daerahnya sendiri apakah itu Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatan pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sebatas hanya melalui pembentukan UU 32/2004 semata, tetapi juga lewat produk hukum lainnya baik itu berupa peraturan pemerintah (PP) seperti PP Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono pada 11 Februari 2005. Dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) seperti Perpu Nomor 3 Tahun 2005 untuk merevisi sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004. Sebagai respon terhadap putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Bersamaan dengan keluarnya Perpu tersebut tidak lama kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah lainnya yaitu PP No. 17 Tahun 2005 sebagai revisi atas PP No.6 Tahun 2005.

Sekilas, berbagai macam aturan pelaksanaan diatas nampak menggambarkan kecarut-marutan penjabaran konstitusi di negara kita. Namun setidaknya dapat mewakili ketentuan dari pemilihan seorang pejabat publik di daerah sesuai yang tercantum dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 hasil perubahan dan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang tidak hanya mensyaratkan kemandirian dalam bidang ekonomi tetapi juga kemandirian dalam bidang politik sesuai dengan asas dan konsepsi demokrasi yang mengharuskan adanya distribusi dan pemisahan kekuasaan.

Dalam setiap kegiatan pemilihan umum yang secara periodik dan berkala di langungkan di Indonesia baik itu selama rezim pemerintahan orde baru maupun ketika datangnya reformasi termasuk didalamnya Pilkada langsung yang

diadakan semenjak pertengahan tahun 2005 atau tepatnya bulan Juni 2005. selalu diwarnai oleh munculnya fenomena golput. Golput yang merupakan singkatan dari Golongan Putih atau jumlah pemilih terdaftar yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya, terutama dalam Pilkada cenderung mengalami peningkatan cukup masif apabila dibandingkan dengan pemilihan pada tahun sebelumnya yaitu Pemilu 2004 yang terdiri dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang berlangsung selama dua kali masa pemilihan. Karena apabila dibandingkan dengan golput pada pemilu 2004, golput dalam Pilkada jumlahnya cenderung naik mulai dari 23 persen hingga 44 persen

Fenomene golput dapat diidentikkan dengan perilaku memilih, karena perilaku memilih itu sendiri dalam khasanah ilmu politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum apakah memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jika memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya maka ia akan memilih salahsatu kandidat baik itu calon perseorangan maupun partai yang ditawarkan dalam pemilihan umum. Sedangkan bila berlaku sebaliknya alias tidak menggunakan hak pilihnya maka yang bersangkutan akan memilih untuk golput alias tidak memilih sama sekali calon maupun partai yang berkompetisi memperebutkan dukungan rakyat dalam pemilu. Menurut Surbakti (1992: 145), perilaku memilih didasari oleh oleh lima pendekatan, yaitu : (i). Pendekatan Struktural, pendekatan ini melihat perilaku memilih sebagai hasil dari bentuk sosial yang luas cakupannya. Seperti jumlah partai, kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, sistem kepartaian, program kerja atau visi maupun misi yang diusung oleh partai, yang semuanya ini tentunya berbeda

antara satu negara dengan negara lainnya disebabkan karena adanya perbedaan basis sosial yang ada di masyarakat. (ii) Pendekatan Sosial, yang cenderung menempatkan dan menghubungkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Seperti latar belakang kependudukan dan sosial ekonomi, gender, wilayah bermukim, profesi, pendidikan, status sosial, tingkat pendapatan, serta agama. Yang semuanya itu dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Menurut Gaffar (1992: 5), pendekatan sosiologis menggambarkan ciri serta penggolongan kelompok-kelompok sosial yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah perilaku memilih seseorang. (iii) Pendekatan Ekologis, yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat adanya sebuah ciri khas dari pemilih yang berdasarkan unit teritorial seperti Desa, Kelurahan, Kecamatan, serta Kabupaten. Dan juga kelompok masyarakat dengan tipe tertentu seperti penganut agama, profesi, suku, dan bermukim di suatu wilayah. Apabila terdapat hasil perubahan dalam pemilu dibandingkan dengan hasil sebelumnya, maka fenomena itu dapat dijelaskan dengan perubahan komposisi penduduk yang tinggal di wilayah yang mengalami perubahan hasil pemilu tersebut. (iv) Pendekatan Psikologis Sosial, yang dikembangkan untuk merespon kelemahan yang dimiliki oleh Pendekatan Sosiologis, terutama pada kerangka analisis metodologinya. Berupa pengukuran kelas, kriteria pendidikan, dan lain sebagainya. Apter (1988: 260) menjelaskan pendekatan ini dengan menggunakan dan mengembangkan konsep sikap serta sosialisasi untuk menggambarkan perilaku memilih seseorang. Menurut Apter seseorang dalam menjatuhkan pilihan lebih karena dipengaruhi oleh kekuatan

psikologis yang muncul dalam dirinya sebagai hasil dari proses sosialisasi. (v) Pendekatan Pilihan Rasional, melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi, yang meliputi antara lain ongkos memilih, kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan dan perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan seperti ini digunakan baik oleh pemilih maupun pihak yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Untuk pemilih sendiri pemikiran tentang untung atau rugi dijadikan landasan untuk sikap apakah

Walaupun dalam Pilkada kali ini yang berkompetisi dan memperebutkan kursi sebagai seorang pejabat Eksekutif lokal adalah perorangan bukan kelompok golongan maupun partai politik tertentu. Bukan berarti partai politik dapat disingkirkan begitu saja dari kegiatan politik lima tahunan ini. Karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam salah satu pasal UU No. 32 Tahun 2004, bahwa yang berhak maju untuk bertarung dalam Pilkada ialah hanya terbatas bagi mereka saja yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang mendapat jumlah perolehan suara sekurang-kurangnya lima belas persen dari jumlah kursi di DPRD, atau lima belas persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan perannya yang seperti ini maka partai politik menurut Huznar dan Stevenson dalam Sukarna (1981: 89) dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Dan berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintah secara sah dengan

mengikuti pemilu dan mendapat suara mayoritas untuk mendudukkan wakilnya di badan Legislatif maupun Eksekutif, atau mungkin bekerja secara tidak sah atau subversif untuk memperoleh kekuasaan yaitu melalui revolusi atau kudeta.

Sedangkan Carl J. Friedrich dalam Budiarjo (1982: 161) mendefinisikan lebih jauh lagi tentang partai politik sebagai suatu kelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk menjamin dan mempertahankan pemimpin mereka agar dapat mengendalikan pemerintahan dan memberikan keuntungan yang bersifat materiil maupun spirituil.

Sebagai sebuah organisasi sosial, partai politik memiliki fungsi yang beragam diantaranya adalah (Haryanto, 1984: 11), (i) sebagai sarana sosialisasi politik, yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai baik kepada anggota maupun pendukung mereka. (ii) sebagai sarana rekrutmen politik, melalui pencarian anggota-anggota baru dan berbakat untuk diajak untuk melakukan kegiatan atau proses politik untuk diorbitkan menjadi calon pemimpin. Yang ditempuh melalui kontak pribadi, persuasi, dan kaderisasi. (iii) sebagai sarana komunikasi politik, melalui kegiatan menyalurkan informasi secara timbal balik dan berperan sebagai penghubung antara mereka yang memerintah dengan yang diperintah. (iv) sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan, dengan jalan merumuskan dan menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, serta kepentingan yang ada dalam masyarakat kepada pihak penguasa (v) partai politik sebagai sarana artikulasi politik, dapat dikatakan berhasil apabila banyak warga negara yang menjadi anggota suatu parpol atau semakin aktif terlibat dalam kegiatan sebuah partai politik tertentu. (vi) partai politik sebagai sarana

pembuatan kebijakan, dapat dicapai bila partai politik memegang kekuasaan pemerintahan secara mayoritas. (vii) partai politik sebagai sarana pengatur politik, dengan cara mengatur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar tetap menjadi sehat, serta meredakan konflik yang ada. (viii) partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa, yang sering dilakukan oleh partai minoritas atau oposisi.

Menurut Palmer dalam Cipto (1996: 6) ada tiga fungsi pokok partai politik di negara berkembang yaitu : (1) menyediakan dukungan basis massa yang stabil, (2) sebagai sarana integrasi dan mobilisasi, dan (3) sebagai pemelihara kelangsungan hidup politik atau pemelihara kepentingan status quo, dan sebagai media komunitas yang tidak jarang satu sama lain saling bertentangan.

Salah satu ciri bahwa suatu negara menganut sistem demokrasi ialah dengan diadakannya pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan untuk memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan pemilihan umum berpengaruh langsung pada pembentukan orientasi atau budaya politik, sebab perilaku para kontestan dan penyelenggara pemilihan umum langsung dihayati oleh anggota masyarakat yang mengetahuinya. Sedangkan budaya politik sendiri menurut Sanit (1985: 169) terdiri dari sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol dan nilai yang menentukan situasi bagi pelaksanaan tingkah laku atau perilaku politik. Khusus untuk budaya politik di Indonesia, yang lebih menonjol ialah keyakinan, simbol, nilai-nilai primordial baik itu agama, adat, kedaearahan, keturunan, dan bahasa. Yang

berasal dari budaya dan tradisi masing-masing komunitas bangsa Indonesia yang telah hidup di antara seluruh komunitas tersebut.

#### *Metodologi Penelitian*

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena mencoba untuk meneliti dan mengetahui kejadian sosial atau politik tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan populasi atau jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga adalah seluruh warga kota Semarang yang telah mempunyai hak pilih dan tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai pula dengan kepemilikan kartu tanda pemilih sebagai bukti bahwa seseorang berhak untuk memilih dalam Pilkada. Adapun jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 96 orang, yang diperoleh dengan menggunakan rumus Frank Lynch (Kerlinger, 1987: 199).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di kota Semarang yang secara administratif sudah memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya ketika berlangsungnya kegiatan pemungutan suara yang disertai bukti kepemilikan kartu tanda pemilih dan tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai bukti bahwa seseorang berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Jumlah populasi tersebut sebanyak 999.693 orang dan diambil sampel sebanyak 96 orang berdasarkan penggunaan rumus Frank Lynch (Kerlinger, 1987: 199).

Penelitian dilakukan dengan secara studi kasus, yaitu di sebuah kecamatan Semarang Barat dengan *cluster sampling* berupa tiga kelurahan yang secara

administratif berada di wilayah yuridiksi kecamatan Semarang Barat. Tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan Manyaran, Krapyak, dan Karangayu. Jumlah responden keseluruhan sebesar 96 orang di bagi untuk tiga kelurahan tersebut, jadi masing-masing kelurahan akan ditarik sampel sebanyak 32 orang responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan mengumpulkan data dari obyek penelitian dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, baik berupa laporan, atau dokumen yang dimiliki perusahaan serta sumber-sumber pustaka yang menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini terdiri dari : Field Research, melakukan pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian. Adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut : Kuesioner, Interview atau wawancara, Library Research. Teknik Pengolahan Data meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : Editing, Coding, Tabulating.

## **B. Pembahasan**

Selama pertengahan tahun atau tepatnya pada bulan Juni 2005, penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dihadapkan pada munculnya sebuah perubahan. Yakni mulai dipilihnya secara langsung para Kepala Daerah di Indonesia secara langsung baik itu untuk daerah yang berkedudukan sebagai Propinsi maupun Kabupaten/Kota oleh penduduk di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dengan demikian rakyat yang semula hanya menjadi penonton di pinggir arena politik pemilihan pejabat Eksekuti daerah menjadi penentu utama dalam menentukan siapa yang berhak untuk memimpin dan

memajukan daerah mereka dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sebaliknya para anggota Dewan yang semula memegang kunci dan peranan penting yang amat besar dalam menentukan pejabat Kepala Daerah, berganti peran dengan rakyat yang semula hanya duduk manis di pinggir lapangan menyaksikan jalannya proses pemilihan yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya.

Diharapkan dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung seperti ini selain akan mengurangi berbagai macam kekurangan dan praktek kebusukan politik yang senantiasa selalu menyertai pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme perwakilan. Juga akan melahirkan sosok seorang Kepala Daerah yang lebih *legitimated* dan kuat kedudukannya sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD, dan akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat yang telah memilihnya (Marijan, 2006: 18). Dengan situasi yang seperti ini diharapkan pula nantinya setiap keputusan dan kebijakan politik yang dihasilkan oleh Kepala Daerah terpilih akan berpihak sepenuhnya kepada aspirasi dan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Disamping itu pula dengan adanya pemilihan secara langsung semacam ini akan meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik rakyat yang akan semakin memahami tujuan dan arti penting akan diselenggarakannya sebuah pemilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan pula memperkuat dan menumbuhkembangkan konsep *check and balances* dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan cara menempatkan secara peranan antara Kepala Daerah dan DPRD agar tidak menempatkan salah satu

diantaranya menjadi lebih superior atau lebih kuat dibandingkan yang lain (Kristiadi, dalam *Suara Merdeka*,28/12/05).

Karena secara idealis Pilkada akan memperkuat dan memperkokoh tingkat demokratisasi di daerah, sebab keterlibatan dan partisipasi konstituen dalam mengontrol pemerintah daerahnya menjadi lebih besar dan semakin kuat karena adanya keinginan untuk membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh di tingkat lokal. Terjadinya tarik-menarik antara kepentingan kelompok dan keinginan untuk membangun fondasi demokrasi di tingkat lokal yang lebih kokoh, akan memicu derajat kerawanan konflik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan Presiden yang diadakan pada tahun sebelumnya. Meskipun dalam Pilkada jauh-jauh hari diprediksikan oleh abanyak pihak akan rawan menimbulkan berbagai macam konflik horizontal baik menjelang proses pelaksanaannya maupun ketika memasuki proses penetapan pemenang Pilkada. Dari pelaksanaan Pilkada yang telah lampau, secara umum berjalan relatif lancar dan tertib, ini dapat dilihat dari iklan layanan masyarakat Mendagri yang disertai dengan pemaparan grafik sebesar 92 persen yang menunjukkan pilkada berjalan lancar dan tertib. Sedangkan sisanya berjumlah delapan persen hanya yang bermasalah.

Pemaparan tersebut sepintas menggambarkan rasa optimisme akan semakin besarnya tingkat perkembangan demokrasi dalam Pilkada secara langsung, seakan-akan Pilkada tidak menimbulkan dan memiliki persoalan yang cukup berarti bagi pemerintah. Padahal pendekatan demokrasi tidak semata-mata hanya dapat dilihat dari aspek keamanan semata yang sudah dianggap *out of date* dan

kadaluarsa karena dapat menepikan potensi dan dinamika demokrasi masyarakat (Sardini, dalam *Suara Merdeka*, 14/12/05).

Meskipun dalam pelaksanaan banyak sekali diwarnai oleh berbagai masalah seperti konflik, gugatan ke pengadilan, penundaan hasil pemilihan, dan maraknya kasus politik uang. Tetapi masalah golputlah yang paling menonjol dalam setahun terakhir, yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami kenaikan dari jenjang ranagkaian pemilihan umum sebelumnya. Fakta semakin tingginya jumlah angka golput seperti inilah yang pada akhirnya menjungkirbalikkan penilaian pemerintah melalui depdagri dengan berspekulasi dan merasa optimis bahwa angka di Pilkada kali ini akan sangat rendah dibandingkan pemilihan sebelumnya. Meskipun Pilkada sesuai dengan isi iklan layanan masyarakat Mendagri yang berjalan relatif relatif sukses dan lancar, tetapi Pilkada berlangsung dalam situasi dingin dan kurang bergairah karena rendahnya partisipasi masyarakat. Jauh dari ukuran ideal sebuah pesta demokrasi yang menjadikan partisipasi yang relatif tinggi dan konsisten sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosi konstituen terhadap calon Kepala Daerah yang dipilih langsung.

Melesetnya ramalan pemerintah ini dapat dilihat dari naiknya jumlah angka golput yang terus merangkak dan mengalami kenaikan berkisar mulai 23 persen hingga 44 persen dari jumlah pemilih terdaftar yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yang rata-rata jumlahnya mencapai 31 persen dari keseluruhan Kabupaten dan Kota yang sepanjang bulan Juni 2005 telah melaksanakan Pilkada ( *Kompas*, 15/12/2005). Uniknya, setiap besaran jumlah proporsi golput Pilkada di suatu daerah ternyata mempunyai keterkaitan yang

sangat linier atau positif dengan angka golput pada pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya semakin tinggi jumlah angka golput di suatu daerah pada pemilu sebelumnya seperti dalam pemilihan Presiden tahun 2004 misalnya, akan memiliki dampak yang besar terhadap jumlah proporsi golput dalam Pilkada.

Meskipun senantiasa senantiasa terus mengalami sejumlah kenaikan dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya, sebagai gerakan non-partisan golput tidak mempunyai kekuatan cukup berarti dalam kuantifikasi atau persentase jumlah pemilih. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, pengesahan hasil Pilkada tidak menentukan persyaratan persentase jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun aspek legal tentunya berbeda dengan dengan tinjauan politis, sebab tidak maksimalnya jumlah pemilih akan berdampak kepada legitimasi politik dan kekuasaan Kepala Daerah terpilih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### **C. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berdampak terhadap semakin tingginya jumlah angka golput pada pemilihan Walikota Semarang tanggal 26 Juni 2005 di Kecamatan Semarang Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, mekanisme pencalonan Kepala Daerah yang hanya melalui satu pintu, yaitu partai politik. Kedua, karena sikap pragmatis dan feodalistik partai politik dalam mengajukan calon Kepala daerah yang akan dipilih oleh masyarakat dalam Pilkada. Ketiga kampanye yang dilakukan oleh para peserta Pilkada tidak dapat memikat perhatian masyarakat, karena banyak memberikan janji-janji yang

abstrak, tak terukur, tidak spesifik dan cenderung berisifat satu arah, karena lebih mengedepankan pola-pola lama yang mencerminkan kekuatan massa daripada membangun reputasi secara mandiri. Keempat, sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara kurang efektif dalam menjangkau minat masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

Dari keempat kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran berupa, Pertama, ada baiknya jika Pilkada di masa mendatang nantinya juga turut menyertakan calon Kepala Daerah yang tidak diajukan oleh partai politik alias independen dan non-partisan. Kedua, perlu segera dilakukan perbaikan atau reformasi terhadap partai politik, dengan catatan bahwa agenda tersebut harus sesuai dengan sistem pemerintahan dan pemilihan umum yang hendak dibangun. Ketiga, sudah saatnya kampanye yang dilakukan oleh para kontestan Pilkada beserta tim sukses mereka mampu untuk meyakinkan pemilih agar dapat mengenal dan mencintainya yang berlanjut hingga datangnya masa pemungutan suara. Keempat, sosialisasi yang diberikan kepada pemilih harus dapat berperan sebagai pemberi akses informasi tentang program dan jejak rekam para peserta Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel & Sidney Verba, *Budaya Politik*. Jakarta, Bumi Aksara; 1984.
- Apter, David, *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta, CV Rajawali; 1988.
- Asfar, Muhammad. 1996. *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih*, dalam Jurnal Ilmu Politik Nomor 16.
- Asfar, Muhammad. 1997. *Perilaku Politik Pemuda Perkotaan ; Kasus Surabaya*, dalam analisis CSIS. Tahun XXVI, No 2.
- Bisri, A. Zaini & Amirudin, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Sengketa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2006.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka; 1982.
- Cipto, Bambang, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1996.
- Gaffar, Affan, *Javanese Voters; A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. YogYakarta, UGM Press; 1992.
- Haryanto, *Parpol; Suatu Pengantar Umum*. Yogyakarta, Liberty; 1984.
- Kerlinger, Fred N. Dan Elazhar J. Pedhazur, *Korelasi dan Analisis Regresi Berganda*. Yogyakarta, Nur Cahaya; 1987.
- Kristiadi, J. "Pilkada dan Prospek Demokrasi". Dalam Suara Merdeka, 28 Desember 2005.
- Mahendra, A.A. Oka., *Pilkada di Tengah Konflik Horisontal*. Jakarta, Milenium Publisher; 2005.
- Mas'oed, Mochtar & Collins Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta, UGM Press; 1995.